

**PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT: PERSPEKTIF KOMUNITAS GEN-Z
MUSLIM KABUPATEN DEMAK**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh :
Popi Wulan Sari
31402100021**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA DENGAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PARTISIPASI MASYARAKAT: PERSPEKTIF KOMUNITAS GEN-Z MUSLIM KABUPATEN DEMAK

Disusun Oleh :

Popi Wulan Sari

31402100021

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 29-5 2025
Pembimbing,



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., P.hD., Ak., CA., IFP., AWP.
NIK. 211403012

LEMBAR PENGESAHAN**SKRIPSI****PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT: PERSPEKTIF KOMUNITAS GEN-Z
MUSLIM KABUPATEN DEMAK**

Disusun Oleh :

Popi Wulan Sari

NIM. 31402100021

Telah disetujui oleh Dosen Review dan Dosen Pembimbing Skripsi
Pada Tanggal Juni 2025

Dosen Review



Hani Werdi Apriyanti, SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIK. 211414026

Dosen Pembimbing



Provita Wijayanti, SE.,M.Si.,Ph.D.,Ak.,CA.,IFP.,AWP
NIK.211403012

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Tanggal Juni 2025



Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Provita Wijayanti, SE, M.Si, Ph.D, Akt, CA, IFP
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Popi Wulan Sari
NIM : 31402100021
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Bisnis
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul : **“PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA DENGAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PARTISIPASI MASYARAKAT: PERSPEKTIF KOMUNITAS GEN-Z MUSLIM KABUPATEN DEMAK.”**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bila mana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 29 Mei 2025
Yang Menyatakan,



Popi Wulan Sari
NIM. 31402100021

PERNYATAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Popi Wulan Sari
NIM : 31402100021
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Bisnis
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyerahkan hasil karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul :
“PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA DENGAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PARTISIPASI MASYARAKAT: PERSPEKTIF KOMUNITAS GEN-Z MUSLIM KABUPATEN DEMAK.”

Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk menyimpan, mengalihkan, mengelola dalam pangkalan data, dan publikasi melalui internet atau media lain demi kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya tulis ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Mei 2025
Yang Menyatakan,



Popi Wulan Sari
NIM. 31402100021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung.

Skripsi ini bukan sekadar lembaran akademik, ia adalah saksi dari perjalanan panjang, penuh harap, doa, dan perjuangan. Sebagai anak pertama sekaligus sarjana pertama dalam keluarga, penulis menapaki langkah ini dengan sepenuh hati dan harapan besar agar ilmu yang diperoleh dapat menjadi jalan keberkahan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, masyarakat, dan umat.

Terselesaikannya karya ini tidak lepas dari peran banyak pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan doa, bantuan, dan bimbingan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT**, Dzat yang Maha Mengatur segalanya. Atas segala kemudahan, kekuatan, dan ketenangan yang diberikan-Nya dalam setiap proses dan perjuangan.
2. **Bapak Moh. Nasru Rohman & Ibu Siti Adibatun**, Beliau merupakan dua sosok luar biasa dalam hidup penulis yang meskipun tidak pernah mengecap pendidikan di bangku perguruan tinggi, namun telah menjadi pendidik pertama dan terbaik sepanjang hidup penulis. Setiap langkah yang saya tempuh hingga mencapai titik ini, senantiasa ditopang oleh doa-doa tulus yang mungkin tak

terucap, namun begitu nyata terasa dalam keseharian. Terima kasih atas izin dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk menapaki jalan yang mungkin asing dan belum pernah dilalui sebelumnya. Terima kasih atas keyakinan yang Ibu dan Bapak tanamkan, bahkan terhadap mimpi yang mungkin tidak sempat dirangkai untuk diri sendiri. Menjadi sarjana pertama dalam keluarga merupakan persembahan kecil dari hati yang penuh cinta dan rasa hormat atas segala perjuangan yang telah Bapak dan Ibu lewati. Semoga pencapaian ini dapat menjadi awal dari lahirnya harapan-harapan baru yang lebih tinggi dalam keluarga kita.

3. **Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP**, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Selama masa bimbingan, beliau tidak hanya berperan sebagai pengarah akademik, tetapi juga sebagai sosok yang senantiasa memberikan ruang bagi penulis untuk mengeksplorasi kemampuan, menyampaikan gagasan, serta mengembangkan potensi diri. Dalam setiap prosesnya, penulis merasakan kehadiran beliau sebagai figur yang mendukung, melindungi, dan memfasilitasi pertumbuhan intelektual maupun pribadi penulis. Terima kasih atas kepercayaan, bimbingan, dan perhatian yang Ibu berikan dengan penuh kehangatan.
4. **Pramudya Cahya Rendra**, Mahasiswa S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, yang telah menjadi partner dalam berbagai hal selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung. Terimakasih atas kesediaannya menjadi rekan diskusi yang kritis, penyemangat di kala proses terasa berat, serta sosok

yang senantiasa hadir dengan pemikiran-pemikiran yang konstruktif. Kontribusi berupa dukungan moral, pertukaran gagasan, hingga kebersamaan dalam melewati berbagai dinamika selama masa studi ini sangat berarti bagi penulis. Beliau adalah salah satu alasan penulis untuk terus berproses dan menjadi versi terbaik dari diri penulis, hari demi hari.

5. **Puja Ichwani & M. Ivan Tri Arjuna** merupakan kedua adik tercinta yang telah menjadi sumber semangat dan motivasi tersendiri selama proses penyusunan skripsi ini. Sebagai kakak pertama, penulis menyadari bahwa tanggung jawab moral dan peran sebagai teladan bukanlah hal yang ringan. Namun, keberadaan mereka justru menjadi alasan kuat bagi penulis untuk terus melangkah, berjuang, dan menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Harapan penulis, jejak langkah yang penulis tempuh saat ini dapat menjadi pintu pembuka bagi mereka, agar dapat menapaki jalan yang lebih baik dan lebih luas di masa mendatang. Terima kasih atas doa, dukungan, dan cinta yang senantiasa mereka berikan, meskipun tidak selalu terucap secara langsung.
6. **Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, atas arahan dan kebijakan yang mendukung proses akademik penulis.
7. **Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)** atas kesempatan beasiswa yang telah diberikan. Melalui dukungan ini, penulis dapat menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana. Doa yang senantiasa dipanjatkan dalam setiap sujud, agar dapat menempuh pendidikan tinggi dan menjadi sarjana, akhirnya

Allah kabulkan melalui jalan yang mulia ini. Semoga UNISSULA senantiasa menjadi lembaga pendidikan yang menghadirkan keberkahan, mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan membawa kemaslahatan bagi umat.

8. **Seluruh Dosen, Staff, dan Karyawan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Sultan Agung**, yang telah tulus membagikan ilmu, semangat, dan keteladanan selama masa studi.
9. **Rekan-rekan S-1 Akuntansi Angkatan 2021**, atas kebersamaan, bantuan, dan motivasi yang luar biasa selama menempuh pendidikan.
10. **Rekanita PC IPPNU Kabupaten Demak Masa Bhakti 2023–2025**, atas doa dan dukungan yang terus menguatkan penulis, bahkan di tengah padatnya amanah organisasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan dan kekurangan adalah hal yang tidak terelakkan dalam setiap proses belajar.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menjadi inspirasi, dan menambah khazanah pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan penguatan good governance di lingkungan desa.

Semarang, 29 Mei 2025
Penulis,



Popi Wulan Sari
NIM. 31402100021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good governance dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dari perspektif komunitas Gen-Z Muslim di Kabupaten Demak. Pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sering dihadapkan pada tantangan rendahnya partisipasi publik dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden yang merupakan anggota dan pengurus IPNU-IPPNU berusia 20–27 tahun di Kabupaten Demak. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa good governance berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa, serta good governance berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja pemerintah desa melalui partisipasi masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan aktif generasi muda, khususnya Gen-Z Muslim, menjadi kunci dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas partisipatif generasi muda serta penguatan prinsip good governance menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja pemerintah desa secara menyeluruh.

Kata Kunci : good governance, partisipasi masyarakat, kinerja pemerintah desa, Gen-Z Muslim, Kabupaten Demak.

ABSTRACT

This research intends to scrutinize the impact of sound public administration and societal involvement on the efficacy of local governing bodies from the viewpoint of young adult Muslim communities in Demak Regency, Indonesia. Local governing bodies hold a vital position in advancing countryside progress and public well-being; however, they frequently face obstacles such as restricted citizen interaction and substandard administrative practices. This inquiry adopts a quantitative methodology utilizing a survey technique involving 100 participants who are active affiliates of IPNU and IPPNU, ranging in age from 20 to 27 years. Data were compiled via questionnaires and assessed employing Structural Equation Modeling (SEM) with the Partial Least Squares (PLS) technique. The outcomes demonstrate that good governance exerts a considerable influence on community participation, which subsequently substantially affects village government performance. Moreover, community participation acts as an intermediary in the connection between good governance and village government performance. These findings highlight the strategic role of Gen-Z youth in fostering transparency, accountability, and public involvement at the village level. Strengthening participatory capacity among young people and reinforcing good governance principles are therefore essential strategies to enhance the overall quality and effectiveness of rural governance.

Keywords : good governance, community participation, village government performance, Gen-Z, Muslim youth, Demak Regency

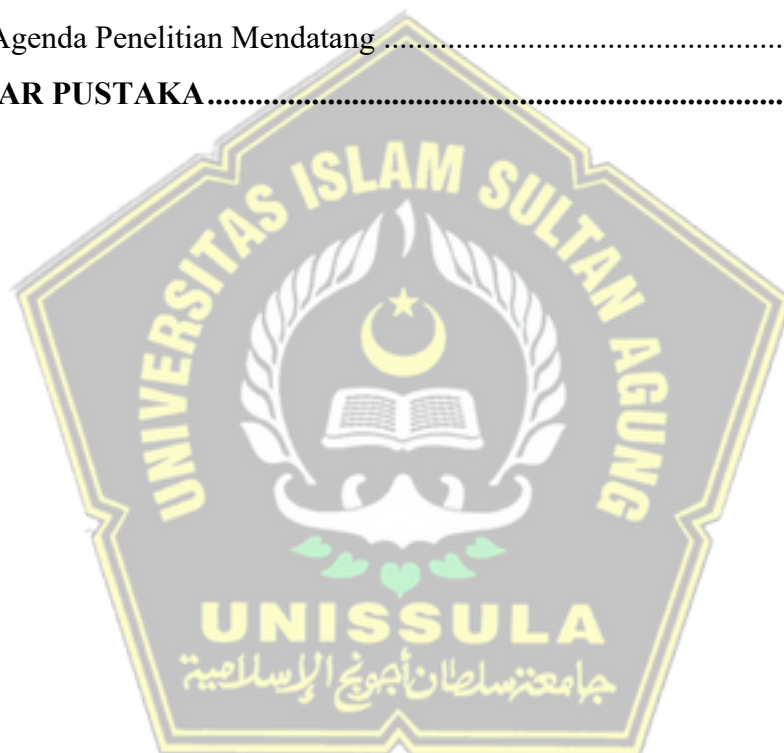
UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Organisasi.....	7
2.2 Variabel Penelitian	8
2.2.1 Kinerja Pemerintah Desa.....	8
2.2.2 <i>Good Governance</i>	9
2.2.3 Partisipasi Masyarakat	10
2.3 Pengembangan Hipotesis	13
2.3.1 Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap partisipasi masyarakat.....	13
2.3.2 Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa ...	14
2.3.3 Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap kinerja pemerintah desa melalui partisipasi masyarakat	14
2.4 Kerangka Penelitian	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 jenis Penelitian	17

3.2	Populasi Dan Sampel Penelitian	17
3.2.1	Populasi Penelitian	17
3.2.2	Sampel Penelitian	18
3.3	Sumber Dan Jenis Data	19
3.4	Metode Pengumpulan Data	19
3.5	Definisi Variabel Dan Indikator	20
3.5.1	Variabel Dependen (Y)	20
3.5.2	Variabel Independen (X)	20
3.5.3	Variabel Intervening	21
3.6	Teknik Analisis Data	22
3.6.1	Analisis Deskriptif	22
3.6.2	Analisis Data Menggunakan <i>Structural Equation Model</i> (PLS)	22
3.6.3	Merancang Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	23
3.6.4	Merancang Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	25
3.6.5	Pengujian Hipotesis	26
3.6.6	Alur Analisis Data Menggunakan <i>SMART-PLS</i>	27
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1	Hasil Penelitian	28
4.2	Karakteristik Responden	29
4.2.1	Jenis Kelamin Responden	29
4.2.2	Domisili Responden	30
4.3	Analisis Deskripsi Variabel	30
4.3.1	Variabel <i>Good Governance</i>	31
4.3.2	Variabel Partisipasi Masyarakat	33
4.3.3	Variabel Kinerja Pemerintah Desa	34
4.4	Analisis Data	36
4.4.1	Penilaian <i>Outer Model</i> (<i>Model Measurement</i>)	36
4.4.2	Uji Reliabilitas	39
4.4.3	Analisis Model Struktur (<i>Inner Model</i>)	40
4.4.4	Uji Hipotesis	42
4.5	Pembahasan	46

4.5.1 Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap Partisipasi Masyarakat	46
4.5.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa ...	47
4.5.3 Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap Kinerja Pemerintah Desa melalui Partisipasi Masyarakat	49
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
5.3 Keterbatasan Penelitian	54
5.4 Agenda Penelitian Mendatang	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3. 1 Skor Skala Likert	19
Tabel 3. 2 Operasional Variable (Y).....	20
Tabel 3. 3 Operasional Variable (X).....	21
Tabel 3. 4 Operasional Variable	21
Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data	28
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden.....	29
Tabel 4. 3 Domisili Responden.....	30
Tabel 4. 4 Skala Interval	31
Tabel 4. 5 Tanggapan Responden Pada Variabel Good Governance	31
Tabel 4. 6 Tanggapan Responden Pada Variabel Partisipasi Masyarakat	33
Tabel 4. 7 Tanggapan Responden Pada Variabel Kinerja Pemerintah Desa	34
Tabel 4. 8 Outer Loadings (Measurement Model).....	36
Tabel 4. 9 Cross Loading.....	38
Tabel 4. 10 Composite Reliability, Cronbach's Alpha dan AVE	39
Tabel 4. 11 Nilai R-Square	41
Tabel 4. 12 Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung (Direct Effect)	43
Tabel 4. 13 Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect).....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	16
Gambar 3.1 Alur Analisis Data Menggunakan SMART-PL	27
Gambar 4. 1 Uji Validitas Outer Loading	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembaga Kuesioner Penelitian.....	59
Lampiran 2 Hasil Analisis Data Menggunakan PLS SEM 4.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri, hal ini dapat di garis bawahi bahwa fokus pembangunan di Indonesia adalah meningkatkan pertumbuhan pedesaan menuju kemandirian. Peran ini didukung dengan berbagai program bantuan dana khusus untuk desa dengan jumlah yang besar. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia memberikan bantuan program desa sebesar Rp. 72 triliun, dengan alokasi Rp. 37,08 triliun untuk program Desa Kreasi, Rp. 29,16 triliun untuk membantu Desa Live Cash, dan Rp. 5,76 triliun untuk membantu desa aman dari COVID-19. Kegagalan pengelolaan dana desa dilaporkan di berbagai daerah karena kurangnya kinerja dari pemerintah desa. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berkomitmen membawa desa keluar dari kemiskinan dan marginalisasi dengan mengoptimalkan potensi yang ada di setiap desa. Untuk mengelola potensi desa dan mengembangkan pendanaan, pemerintah memerlukan kapasitas dan aturan yang mengaktifkan seluruh elemen masyarakat desa.

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan inisiatif pembangunan sama pentingnya dengan kapasitas otoritas desa untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat penting di setiap level, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, dan evaluasi (Ndraha, dalam Huraerah, 2011:110). Dengan demikian, kerja sama antara

pemerintah desa dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan dan meningkatkan standar hidup di masyarakat. Masyarakat desa dilayani oleh Pemerintah Desa, di antara organisasi lainnya. Untuk berhasil, desa perlu dikelola dengan baik. Akuntabilitas, keterbukaan, pemerataan, efisiensi, efektivitas, keterlibatan masyarakat, supremasi hukum, visi strategis, daya tanggap, dan berorientasi pada konsensus adalah prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas, daya tanggap, kemandirian, ketergantungan, keadilan, dan ketersediaan informasi atau transparansi adalah semua pilar tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Pengelolaan pembangunan desa, termasuk keuangan desa, yang transparan, demokratis, dan disiplin, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa hanyalah salah satu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan desa; peraturan lain yang lebih spesifik, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, juga telah ada. Perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban hanyalah beberapa tugas yang termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, menurut aturan ini. Nulrrahmawati dan rekan-rekan, 2023.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kinerja Pemerintah Desa menjadi sangat penting. Pemerintah desa harus proaktif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, menyikapinya, dan menjaga komunikasi untuk melaksanakan pembangunan kebutuhan dasar dan kemandirian masyarakat. Hal ini penting agar pemerintah desa dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan

yang mungkin dihadapi masyarakat. Bidang utama kinerja pemerintah desa yang kurang baik di Kabupaten Demak adalah pembangunan infrastruktur. Misalnya, karena keterbatasan dana dan kesulitan topografi, pembangunan infrastruktur terkadang tertinggal di lokasi yang jauh atau pesisir.

Di Kabupaten Demak, pengelolaan keuangan desa masih dianggap belum memadai. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi keuangan desa tahun 2021 yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Demak. Inspektorat Kabupaten Demak meluncurkan aplikasi Waskita Desa yang dapat diakses melalui <https://desawaskita.demakkab.go.id> sebagai sumber evaluasi pemerintah desa. Dengan demikian, sebagai pengawas, inspektorat dapat mengetahui kondisi kinerja pemerintah desa, dan berdasarkan hasil penilaian tersebut, hasilnya kemudian disampaikan kepada Bupati Kabupaten Demak untuk dievaluasi bersama dan sekaligus agar kinerja pemerintah desa yang sangat baik dapat memperoleh pujian yang tinggi.

Gen-Z merupakan bagian penting dari struktur sosial di Indonesia yang memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan nasional, termasuk di tingkat lokal seperti desa. Pada saat yang sama, pemerintah desa memiliki peran krusial dalam mengelola dan menyelenggarakan berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat desa. Gen-Z sebagai salah satu kelompok potensial memiliki peran strategis dalam mendukung dan mengawasi kinerja pemerintah desa. Dengan keaktifan para Gen-Z dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pemantauan dan partisipasi dalam

pengelolaan keuangan desa serta pembangunan infrastruktur, akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dapat meningkat.

Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan desa yang bisa mempengaruhi kinerjanya. Permasalahan seperti rendahnya partisipasi aktif masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dan keuangan, serta faktor internal pemerintah desa seringkali menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat desa.

Di sisi lain, anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) & Ikatan Pemuda Pelajar Nahdlatul Ulama (IPPNU) yang berusia 20-27 Tahun, sebagai bagian dari Gen-Z, memiliki potensi besar sebagai agen perubahan di masyarakat, karena mereka telah mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis. Dengan basis keanggotaan yang tersebar luas di berbagai desa, IPNU IPPNU memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mendukung dan memperbaiki kinerja pemerintah desa. Pengaruh positif yang dapat dilakukan oleh anggota IPNU IPPNU antara lain melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa, seperti penggalangan dana, pembangunan infrastruktur, dan program sosial. Mereka juga dapat berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah desa yang progresif, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dan transparansi pengelolaan keuangan.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu populasi yang diteliti dan objek penelitian. Peneliti mengambil judul **“Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa dengan *Good Governance* dan Partisipasi Masyarakat: Komunitas Gen-Z Muslim Kabupaten Demak”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melakukan kajian tentang pengaruh keterlibatan masyarakat dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kinerja pemerintahan desa.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?
- 2) Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa?
- 3) Bagaimana pengaruh tidak langsung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terhadap kinerja pemerintahan desa melalui partisipasi masyarakat.

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis dan menguji secara eksperimental tujuan-tujuan berikut dari penelitian ini:

- 1) Menguji dan menyediakan data empiris yang mendukung dampak tata kelola yang efektif terhadap keterlibatan masyarakat.
- 2) Menguji dan menyajikan data empiris yang menunjukkan bagaimana kinerja pemerintahan desa dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat.
- 3) Menguji dan menyediakan data empiris yang menunjukkan bagaimana kinerja pemerintahan desa dipengaruhi oleh tata kelola yang baik melalui keterlibatan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Keuntungan dari temuan penelitian ini diharapkan terbagi dalam dua kategori, yaitu keuntungan teoritis dan manfaat praktis :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memajukan ilmu pengetahuan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan desa melalui penggunaan tata kelola yang baik dan keterlibatan masyarakat.
- 2) Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik keterlibatan masyarakat dan tata kelola yang baik sedang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa.
- 3) Diharapkan bahwa mahasiswa akan menggunakan penelitian ini sebagai peta jalan untuk penelitian di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis
Temuan penelitian ini dapat memberikan panduan yang berguna tentang cara menggunakan konsep keterlibatan masyarakat dan tata pemerintahan yang baik untuk meningkatkan operasi pemerintahan desa dan kesejahteraan penduduk setempat.
- 2) Bagi Pihak Lain
Penelitian ini juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif secara sosial dengan membantu meningkatkan kualitas kinerja pemerintah desa di Kabupaten Demak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Organisasi

Teori Organisasi membentuk kerangka kerja sebagai pedoman dalam membangun organisasi untuk melaksanakan kebijakan.

Menurut Cukier dkk menjelaskan teori organisasi dari sudut pandang praktis dari pengetahuan dan kemampuan dan pengetahuan dalam pengambilan keputusan, termasuk organisasi pemerintah desa.

Hodge dan Anthony mendefinisikan teori organisasi sebagai kumpulan ide, ajaran, dan teori yang menggambarkan unsur-unsur organisasi dan interaksinya. Jones mendefinisikan teori organisasi sebagai studi tentang cara kerja organisasi dan bagaimana organisasi memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Wursanto (2002:259) mendefinisikan teori organisasi sebagai ide, perspektif, analisis, instruksi, sudut pandang, atau metode untuk menyelesaikan masalah organisasi guna mencapai tujuan yang dicanangkan. Secara umum, kecanggihan dan kompleksitas lembaga dan organisasi yang terbentuk dalam suatu masyarakat merupakan indikator kekayaan sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, penelitian tentang penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan keterlibatan masyarakat dapat bermanfaat dan digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kinerja Pemerintah Desa

Pada hakikatnya, terdapat dua cara pandang dalam memandang konsep kinerja, yaitu kinerja organisasi dan kinerja pegawai. Karena suatu perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa kinerja pegawainya, maka keduanya saling berkaitan. Menurut Prawirosentono (dalam Pasolong, 2010:176), kinerja adalah hasil kerja yang dapat diselesaikan oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, moral, dan etika. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah “Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.” Dalam penelitian ini, organisasi identik dengan pemerintahan desa. Mukarom dan Laksana (2015) menyatakan bahwa konsep organisasi secara luas dapat diartikan sebagai “sebagai wujud formal dari sekelompok orang dengan tujuan masing-masing yang bekerja sama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama.” Konsep kinerja organisasi dijabarkan di sini oleh penulis setelah memahami beberapa definisi tentang kinerja dan organisasi. Kinerja pemerintahan atau organisasi desa merupakan tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan visi serta tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan atau organisasi desa. Kinerja organisasi menentukan tercapai atau tidaknya tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Menurut Keban (2014), kinerja organisasi adalah "sesuatu yang menggambarkan sejauh mana suatu kelompok telah melaksanakan semua kegiatan utamanya sehingga dapat mencapai visi dan misi lembaga. Sementara itu, Nasucha (dalam Fahmi, 2013: 3) mendefinisikan kinerja organisasi sebagai berikut: Dalam hal upaya

sistematis dan peningkatan kapasitas organisasi untuk secara konsisten memenuhi persyaratannya, kinerja organisasi adalah keseluruhan kemandirian organisasi dalam memenuhi kebutuhan yang ditentukan oleh setiap kelompok. Jelas dari pengetahuan sebelumnya tentang gagasan kinerja organisasi bahwa kinerja organisasi merupakan metrik yang mencirikan seberapa baik suatu organisasi telah melaksanakan operasi utamanya untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan oleh organisasi.

2.2.2 *Good Governance*

Perspektif baru tentang administrasi yang dikenal sebagai tata kelola yang baik telah muncul sebagai akibat dari pergeseran paradigma dari pemerintahan ke tata kelola. Tata kelola yang efektif melibatkan pendistribusian kekuasaan ke semua aspek masyarakat sehingga dapat memengaruhi pilihan dan kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang memengaruhi kehidupan masyarakat di dalam sistem pemerintahan. Dari sudut pandang konseptual, tata kelola yang efektif menyiratkan dua hal: 1) Nilai-nilai yang mencakup aspirasi dan nilai-nilai masyarakat yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencapai tujuannya. 2) Sistem yang dirancang pemerintah yang mencapai tujuan ini secara efektif dan efisien.

Zulkarnain (2002: 21) menegaskan bahwa tata kelola yang baik asing bagi budaya Indonesia karena pemerintah dan masyarakat negara bekerja sama untuk mencapai dua tujuan: tata kelola yang demokratis dan tata kelola yang baik. Banyaknya penyimpangan, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, merupakan akar penyebab krisis pemerintahan saat ini dan dapat merusak hubungan di berbagai bidang masyarakat serta penyelenggara kehidupan nasional.

2.2.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi biasanya dikaitkan atau identik dengan pengertian partisipasi. Menurut seorang ilmuwan bernama Davis yang dikutip oleh Santoso (1998), Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, moral, atau perasaan dalam suatu situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan bagi kelompok dalam upaya mencapai tujuan dan ikut bertanggung jawab atas usaha yang dilakukan." Menurut pandangan tersebut, partisipasi tidak tergantung pada kehadiran fisik seseorang dalam bekerja, melainkan pada keterlibatannya untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan sumbangan dalam kelompok.

Menurut Pasaribu (1992:17), partisipasi adalah perhatian, keterlibatan, dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini masyarakat. Untuk menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat menghasilkan energi sosial dalam masyarakat. Menurut Pasaribu (1992:17), berikut ini:

1) Rasa senasib sepenanggungan, tanggung jawab bersama, ketergantungan bersama, dan ketertiban; jika hal ini ada dalam suatu masyarakat, maka keterlibatan yang tinggi akan terjadi; 2) Keterikatan pada sentimen atau tujuan hidup itu sendiri tidak memberikan kemauan untuk terlibat. Bukti nyata dalam hal ini adalah bahwa makan lebih dari sekadar makan rumput; jika tujuannya jelas, ketepatan, stamina, dan tekad hati akan terwujud dalam mencapai tujuan; 3) Fleksibilitas 4) Kehadiran pemrakarsa, atau seseorang yang memulai perubahan, merupakan prasyarat bagi munculnya partisipasi; 5) Iklim partisipasi: partisipasi tidak dapat muncul tanpa terlebih dahulu menciptakan iklim, tetapi jika sudah ada, ia dapat tumbuh dengan

sangat mudah. 6) Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sangat penting untuk menumbuhkan partisipasi.

Menurut Valderama (1999) dalam Arsito (2004), gagasan partisipasi memiliki tiga tradisi, khususnya dalam penerapan masyarakat demokratis. Tradisi-tradisi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Keterlibatan politik lebih difokuskan pada "mempengaruhi" dan "menempatkan wakil rakyat" di lembaga-lembaga pemerintah daripada berpartisipasi aktif dalam operasi pemerintah. 2) Melibatkan masyarakat secara sengaja, khususnya mereka yang dianggap sebagai penerima manfaat atau pihak yang tidak terlibat dalam proses pembangunan, dalam konsultasi atau pengambilan keputusan di setiap tahap siklus proyek pembangunan—dari penilaian kebutuhan hingga penilaian, implementasi, pemantauan, dan evaluasi—dikenal sebagai partisipasi sosial. Pada kenyataannya, keterlibatan sosial dilakukan untuk mendukung mobilisasi sosial dan proses pendidikan. 3) Partisipasi warga negara (juga dikenal sebagai kewarganegaraan), yang menekankan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan lembaga pemerintah. Gagasan partisipasi telah berubah "dari sekadar peduli terhadap penerima amal, kaum terpinggirkan menjadi membahas berbagai cara bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan di sejumlah bidang penting yang berdampak pada kehidupan mereka.

2.2.4 Penelitian Terdahulu

Salah satu sumber yang dimanfaatkan dalam penelitian adalah analisis penelitian terdahulu yang membantu mendukung teori yang digunakan dalam mengevaluasi penelitian saat ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Handayani dkk (2023)	Independen: 1. Good Governance 2. Partisipasi Masyarakat Dependen: Kinerja Pemerintah Desa	Kepala Keluarga di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas	Penelitian ini menyimpulkan bahwa good governance tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.
2	Palangda, Listriyanti (2020)	Independen: Good Governance Dependen: Pelayanan Publik	Masyarakat (konsumen) yang pernah berurusan langsung dalam hal pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Makassar.	Penerapan prinsip-prinsip good governance berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar
3	Sari dkk (2023)	Independen: Good Governance Dependen: Partisipasi Masyarakat	Indonesia	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Governance dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Indonesia.
4	Bisman dkk (2019)	Independen: 1. Partisipasi Masyarakat 2. Kinerja Pengelola Dependen: Kualitas pelayanan	Masyarakat yang memanfaatkan program Pamsimas dari tahun 2008 hingga 2018 di Kabupaten Rokan Hulu	Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan
5	Panjaitan, Pandiangan	Independen:	Desa Bandar Klippa,	Partisipasi masyarakat dalam

		Partisipasi Masyarakat Dependen: Pembangunan Desa	Kabupaten Deli serdang	pelaksanaan pembangunan desa di Desa Bandar Klippa sudah cukup baik, terlihat dari antusias masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
--	--	--	------------------------	---

2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis berikut dapat dibuat untuk penelitian ini berdasarkan isu-isu yang telah diidentifikasi dan kemudian dihubungkan dengan ide-ide yang sudah ada sebelumnya.:

2.3.1 Pengaruh *Good Governance* terhadap Partisipasi Masyarakat

Komponen penting dari pembangunan berkelanjutan adalah keterlibatan masyarakat. Salah satu cara pemerintah dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan adalah melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks pembangunan Indonesia, pemerintah masih menghadapi masalah tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, tata kelola pemerintahan yang baik dapat berhasil diterapkan dan akan menguntungkan pertumbuhan Indonesia dengan dukungan masyarakat. Menurut penelitian Zehan et al. (2023), keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Indonesia dapat ditingkatkan melalui penggunaan konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih jauh, untuk menjamin keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam pembangunan, teknik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik termasuk akuntabilitas dan keterbukaan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan kemampuan pegawai negeri, dan peningkatan standar layanan publik dapat diterapkan.

H1 : *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat

2.3.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Partisipasi masyarakat dan pembangunan desa merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian Elimyati, Romi (2019), Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa di Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggu. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggu, partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Di Desa Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, Febri Nur (2018) menggunakan metodologi penelitian yang berjudul Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah dalam Proses Pembangunan Infrastruktur. Kuesioner dan wawancara digunakan untuk memperoleh data kualitatif deskriptif untuk penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki dampak besar pada variabel pembangunan infrastruktur desa.

H2 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa

2.3.3 Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Desa melalui Partisipasi Masyarakat

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah desa dipengaruhi secara positif oleh tata kelola yang efektif. Hal ini dikarenakan aparatur dalam pemerintahan desa telah berkinerja lebih baik sebagai hasil dari penerapan konsep tata kelola yang baik. Pelaksanaan pengambilan keputusan dan pengungkapan yang relevan dan sah tentang instansi sejalan dengan gagasan

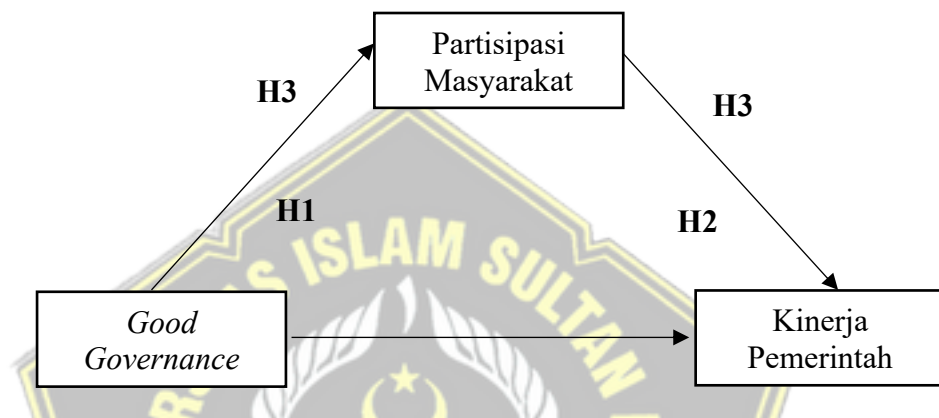
keterbukaan. Hal ini dikarenakan, seperti yang terlihat dari tanggapan responden yang rata-rata memberikan informasi yang cukup, penerapan transparansi dilakukan dengan sangat efektif. Tanggapan responden menunjukkan seberapa baik transparansi diterapkan. Kinerja aparat pemerintah desa dipengaruhi secara positif oleh tata kelola yang baik karena merupakan alat untuk meningkatkan kinerja mereka, khususnya di sektor publik, dan penerapan prinsip-prinsip ini memiliki efek yang menguntungkan (Ambarwati, 2015). Ketika konsep independensi digunakan dalam pengelolaan anggaran secara profesional, konsep ini berbenturan dengan kepentingan, pengaruh, dan tekanan dari luar, yang mendorong pemerintah desa untuk memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan. Peningkatan pendanaan, yang menyediakan pelatihan teknis dan pengawasan, secara substansial mendukung hal ini. Sementara itu, informasi secara inheren akurat ketika ada akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjamin pengelolaan keuangan berjalan dengan disiplin, mencegah pungutan liar dan korupsi. Selain itu, SOP telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Pratiwi & Ulfah (2018), Claraini et al. (2017), Wattimena (2020), dan Dariana & Harrie (2020) yang menemukan bahwa kinerja aparat pemerintah desa dipengaruhi secara positif oleh tata kelola pemerintahan yang efektif. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Nurbaeti & Nugraha (2019) yang menunjukkan bahwa kinerja aparat pemerintah tidak dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan yang baik.

H3 : *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa melalui Partisipasi Masyarakat

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan beberapa unsur yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa, yang dapat dikarakterisasikan sebagai berikut, sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pada Gambar 2.1 menunjukkan kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian
Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa dengan Good Governance
dan Partisipasi Masyarakat: Komunitas Gen-Z Muslim Kabupaten
Demak



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Berdasarkan paham positivisme, penelitian kuantitatif menggunakan alat pengumpulan data secara acak dan analisis statistik (Sugiyono, 2018). Statistik deskriptif atau inferensial biasanya digunakan untuk menganalisis penelitian kuantitatif yang menghasilkan data dalam bentuk angka. Dengan kata lain, angka-angka tersebut diolah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap rumusan masalah penelitian yang telah diidentifikasi (Silaen, 2018).

3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan suatu kategori generalisasi yang terdiri dari item atau orang yang mempunyai jumlah dan atribut tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Masyarakat Muslim Gen-Z Kabupaten Demak yang terdiri dari pengurus atau anggota IPNU & IPPNU yang berjumlah 6.000 sesuai dengan database yang dibuat oleh Pimpinan Kabupaten.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari ukuran dan atribut populasi (Sugiyono, 2017). Jika jumlah orang dalam populasi terlalu banyak sehingga peneliti tidak dapat memeriksa semuanya. Untuk menentukan jumlah sampel yang tepat, digunakan rumus Slovin dengan standar error 10%. Hasilnya adalah sebagai berikut::

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{6.000}{1 + 6.000 (0,1)^2}$$

$n = 98,36$ Responden, dibulatkan menjadi 100 Responden

Berdasarkan rumus slovin jika jumlah populasi sebesar 6.000 dengan standar eror 10% maka ukuran sampel minimum yang memadai yaitu sebanyak 100 responden.

Strategi pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017) dengan menggunakan kriteria-kriteria berikut.:

- 1) Anggota atau Pengurus IPNU & IPPNU Se-Kabupaten Demak yang berusia 20-27 Tahun
- 2) Berprofesi sebagai Mahasiswa, Mahasiswa yang bekerja, Pekerja, dan Berwirausaha

3.3 Sumber Dan Jenis Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari responden yang telah mengisi kuesioner. Data primer berasal langsung dari sumber aslinya dan dikumpulkan oleh peneliti. Sesuai dengan definisi yang dijelaskan oleh Sugiyono, (2018). Dalam konteks penelitian ini, data primer mencakup hasil perolehan langsung dari anggota dan pengurus IPNU IPPNU Se-Kabupaten Demak.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terdiri dari anggota dan pengurus IPNU-IPPNU di seluruh Kabupaten Demak. Teknik ini dipilih untuk mendukung kelancaran proses pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan skala Likert guna mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan (Detik.com, 2023).

Tabel 3. 1 Skor Skala Likert

SS	S	N	TS	STS
5	4	3	2	1

Keterangan:

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Netral (N)
4. Tidak Setuju (TS)
5. Sangat Tidak Setuju (STS)

3.5 Definisi Variabel Dan Indikator

Pada peneitian ini digunakan 3 Variabel, yaitu Variable Independen Good Governance (X), Variabel Dependen Kinerja Pemerintah Desa (Y) dan Variabel Intervening Partisipasi Masyarakat.

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen disebut variabel dependen. Kinerja Pemerintah Desa merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Marbun & Pasaribu, (2021).

Tabel 3. 2 Operasional Variable (Y)

Variable	Indikator
Kinerja Pemerintah Desa (Harno & Islah, 2023)	1. Pelayanan terhadap perangkat dan lembaga desa telah terlaksana dengan baik dan benar 2. Aparat desa mencari solusi terhadap kebutuhan umum masyarakat desa 3. Aparat desa telah melayani masyarakat sesuai tugasnya dengan cepat 4. Aparat desa selalu menampung aspirasi masyarakat desa 5. Lembaga desa sudah mempunyai sumber daya yang memadai untuk pembangunan desa

3.5.2 Variabel Independen (X)

Variabel yang memiliki dampak terhadap variabel lain disebut variabel independen atau variabel bebas. Persepsi publik yang positif dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

Tabel 3. 3 Operasional Variable (X)

Variable	Indikator
<i>Good Governance</i> (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).	1. Penggunaan anggaran desa di komunikasikan secara terbuka kepada masyarakat desa 2. Kegiatan yang dilakukan desa diinformasikan secara jelas kepada masyarakat desa 3. Masyarakat desa terlibat dalam perencanaan pembangunan desa 4. Masyarakat desa dilibatkan dalam pemantauan kegiatan desa 5. Penggunaan dana desa dikelola dengan baik 6. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk kepentingan masyarakat 7. Masyarakat mendapatkan informasi tentang pertanggungjawaban dana desa 8. Pemerataan pembangunan desa memberi manfaat bagi seluruh anggota masyarakat 9. Pembangunan desa memberi manfaat bagi seluruh masyarakat 10. Penyaluran dana melalui desa dilakukan secara adil

3.5.3 Variabel Intervening

Variabel intervening merupakan variabel yang berada di antara variabel independen (penyebab) dan variabel dependen (hasil), dan berfungsi sebagai mekanisme atau proses yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel intervening ini membantu menjelaskan bagaimana atau mengapa hubungan antara variabel independen dan dependen terjadi.

Tabel 3. 4 Operasional Variable

Variable	Indikator
Partisipasi Masyarakat Daeli et al. (2017)	1. Sering memberikan masukan , pemikiran dan pendapat untuk pembangunan desa 2. Sering menyumbangkan dana pribadi untuk mendukung pembangunan desa

	3. Sering berkontribusi pada program desa dengan bekerja tanpa dibayar 4. Sering menyumbangkan fasilitas pribadi untuk mendukung pembangunan desa 5. Kelembagaan desa berperan sangat baik dalam mengkoordinasikan masyarakat untuk berpartisipasi di desa 6. Masyarakat dilibatkan sebagai elemen penting dalam pembangunan desa 7. Masyarakat menjalankan fungsinya dengan baik dalam pembangunan desa 8. Masyarakat bersedia berperan aktif dalam pembangunan desa 9. Masyarakat memiliki motivasi yang tinggi dalam mendukung pembangunan desa
--	--

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis data adalah urutan mencari dan menyusun secara sistematis dengan cara wawancara, dokumentasi sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan untuk menguji seberapa besar penerapan good governance, persepsi positif dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

3.6.2 Analisis Data Menggunakan Structural Equation Model (PLS)

Program SmartPLS, yang dioperasikan oleh media komputer, digunakan dalam pendekatan analisis data penelitian ini. Analisis persamaan struktural (SEM) berdasarkan varians, partial least squares (PLS) dapat mengevaluasi model pengukuran dan struktural secara bersamaan. Uji validitas dan reliabilitas dapat dilakukan menggunakan model pengukuran, sedangkan uji kausalitas dapat dilakukan menggunakan model struktural. Karena PLS menggunakan teknik

bootstrapping atau duplikasi acak, maka tidak akan ada masalah dengan asumsi kenormalan.

3.6.3 Merancang Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model biasa disebut (outer relation atau meansurement model) yang merupakan cara bagaimana setiap blok indikator yang saling berhubungan dengan variabel lainnya. Outer model (model pengukuran) digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Menurut Hair et al., (2010) menyatakan bahwa evaluasi model pengukuran terdiri dari uji validitas (Convergent validity, Discriminant validity, dan AVE), serta uji reliabilitas (Composite reliability dan Cronbach's Alpha).

1. Uji Valliditas

a. *Convergent Validity*

Convergent validity merupakan sebuah konsep dalam penelitian yang berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi (Ghozali, 2021). Evaluasi *Convergent Validity* dilakukan dengan mengamati standardized loading factor. Sebuah indikator dianggap dapat diandalkan jika mempunyai nilai korelasi sebesar $\geq 0,7$ tetapi dalam tahap awal pengembangan instrument penelitian, nilai loading factor $\geq$ masih bisa diterima (Haryono, 2016).

b. *Discriminant Validity*

Discriminant Validity adalah nilai cross loading factor yang digunakan untuk menentukan sejauh mana sebuah konstruk yang

digunakan dari konstruk lainnya dan membandingkan nilai akar AVE dengan korelasi antar konstruk (Haryono, 2016). Dengan adanya nilai yang tinggi dari *Discriminant Validity*, hal tersebut menunjukkan bukti jika suatu konstruk akan dikatakan unik dan bisa menangkap fenomena yang diukur.

c. *Average Variance Extracted (AVE)*

Menurut Haryono,(2016), nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dapat menunjukkan nilai varian yang besar yang bisa dimiliki oleh konstruk laten. Semakin tinggi nilai AVE mempunyai arti bahwa varians yang disebabkan oleh kesalahan pengukuran semakin kecil. Dan jika nilai AVE kurang dari 0,5 maka indikator tersebut dianggap tidak valid dalam mengukur variabel laten yang bersangkutan.

2. Uji Reliabilitas

a. *Composite Reliability*

Composite reliability merupakan sebuah indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada *view latent variable coefficients*. *Composite reliability* mengukur *internal consistency* dari suatu konstruk dan nilai *composite reliability* yang mengindikasikan jika konstruk memiliki konsistensi internal yang tinggi. Dalam pengukuran *composite*.

b. *Cronbach's Alpha*

Cronbach's Alpha merupakan uji reliabilitas yang dilakukan untuk memperkuat hasil dari *composite reliability*. Menurut Ghazali, (2016)

suatu variabel dapat dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai *cronbach's alpha* > 0,7.

3.6.4 Merancang Model Struktural (*Inner Model*)

Analisa inner model memiliki tujuan untuk menguji hubungan antara konstruk laten (Usada et al.,2016). Ada beberapa indikator dari inner model yaitu :

1. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Penggunaan R-Square digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Rule of thumb untuk nilai R-Square yaitu nilai 0.75, 0.50 dan 0.25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, modere dan lemah (Chin, 1988). Semakin tinggi nilai R-Square berarti semakin baik model prediksi dan model penelitian yang diajukan.

2. *Predictive Relevance* (Q-Square)

Q-Square predictive relevance merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisa apakah model dapat membentuk nilai observasi yang baik dan juga estimasi parameter yang tepat. Menurut Ghozali & Hengky, (2015) nilai Q-Square sebagai berikut:

- Nilai Q-Square > 0 menunjukkan bahwa model mempunyai predictive relevance yang baik.
- Nilai Q-Square < 0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

3. Uji *Path Coefficient*

Jika koefisien jalur (*path coefficients*) mempunyai nilai positif, hal tersebut menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel independent dan variabel dependen. Oleh karena itu, jika nilai variabel independent meningkat, maka kecenderungan nilai variabel dependen juga meningkat.

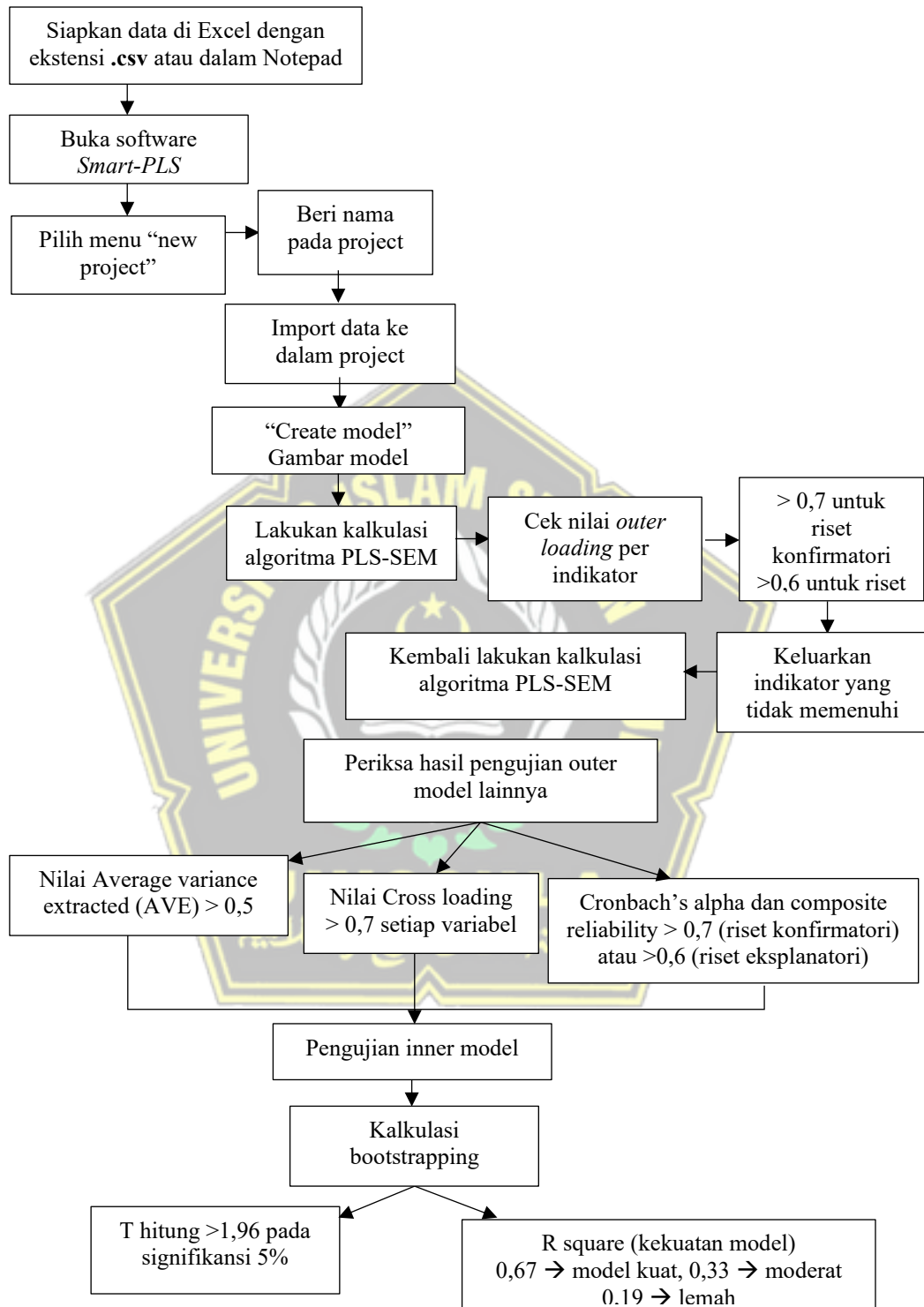
Sementara itu, jika koefisien jalur mempunyai nilai negatif, hal tersebut menunjukkan adanya hubungan berlawanan antara variabel independent dan variabel dependen. Artinya jika nilai variabel independent cenderung meningkat, maka nilai variabel dependen akan menurun.

3.6.5 Pengujian Hipotesis

Nilai t-statistik dan probabilitas digunakan untuk menguji hipotesis. Nilai t-statistik yang digunakan untuk alpha 5% dalam pengujian hipotesis yang menggunakan nilai statistik adalah 1,96. Dengan demikian, kriteria uji t" (Ghozali, 2016) dapat digunakan untuk memperoleh kriteria berikut untuk menerima atau menolak H_0 :

- (1) H_a diterima jika nilai signifikansi kurang dari 0,05.
- (2) Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, H_a ditolak.

3.6.6 Alur Analisis Data Menggunakan *SMART-PL*



Gambar 3.1 Alur Analisis Data Menggunakan SMART-PL

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan dan memberikan ringkasan kinerja pemerintahan desa dari sudut pandang Muslim Gen Z di Kabupaten Demak melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan keterlibatan masyarakat. Untuk mengumpulkan data penelitian ini, kuesioner disebar menggunakan platform media sosial termasuk Instagram dan WhatsApp. Seratus anggota komunitas Muslim Gen-Z Kabupaten Demak menjadi sampel penelitian. Pada bulan April 2025, prosedur pengumpulan data berlangsung selama sekitar satu minggu. Tabel berikut menampilkan hasil pengumpulan data.:

Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data

Kriteria	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebar	100
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0
Jumlah kuesioner yang tidak lengkap	0
Jumlah kuesioner yang memenuhi syarat	100

Sumber: Data Primer yang di olah, 2025

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa semua kuesioner yang dikirimkan telah dikembalikan. Dan seluruh kuesioner memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan. Sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 responden.

4.2 Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini, responden diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan platform Google Form. Jumlah responden yang dijadikan sampel sebanyak 100 orang. Adapun karakteristik responden yang dipilih oleh peneliti adalah individu yang termasuk dalam kategori Generasi Z, beragama Islam, serta aktif dalam berbagai komunitas yang berada di wilayah Kabupaten Demak. Berikut ini disajikan profil responden berdasarkan jenis kelamin dan domisili.

4.2.1 Jenis Kelamin Responden

Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-Laki	25	25%
Perempuan	75	75%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer yang di olah, 2025

Terdapat 100 responden, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.2, dengan 75 responden (75%) adalah perempuan dan 25 responden (25%) adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan mayoritas partisipan penelitian. Keadaan ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan, khususnya dari kalangan Generasi Z Muslim di Kabupaten Demak, memiliki peranan yang cukup besar dalam partisipasi masyarakat dan penerapan prinsip *Good Governance* di tingkat pemerintahan desa.

4.2.2 Domisili Responden

Tabel 4. 3
Domisili Responden

Domisili Responden	Frekuensi	Presentase
Kabupaten Demak	100	100%
Luar Kabupaten Demak	0	0
Total	100	100%

Sumber: Data Primer yang di olah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa data responden telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, responden yang diambil merupakan individu yang berdomisili di Kabupaten Demak. Seluruh responden (100%) memenuhi kriteria tersebut, yaitu berdomisili di wilayah Kabupaten Demak.

4.3 Analisis Deskripsi Variabel

Respon responden dalam penelitian ini dijabarkan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Tiga variabel, yaitu *Good Governance*, Partisipasi Masyarakat, dan Kinerja Pemerintahan Desa, dijabarkan berdasarkan sampel 100 jawaban kuesioner yang diberikan peneliti. Respon responden akan dipaparkan secara rinci oleh peneliti. Untuk mengukur data dalam penelitian ini, digunakan skala likert dengan skor terendah 1 dan skor tertinggi 5. Selanjutnya, respon partisipan akan dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

Rumus dalam perhitungan interval adalah sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{3}$$

$$\text{Interval} = \frac{5-1}{3}$$

$$\text{Interval} = 1,33$$

Rumus tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan sebesar 1,33 antara kategori. Dengan demikian, interpretasi interval kriteria rata-rata berikut dapat dibuat::

Tabel 4. 4 Skala Interval

Nilai	Kategori
1 - 2,33	Rendah
2,34 - 3,66	Sedang
3,67 - 5	Tinggi

Sumber : Data yang diolah, 2025

4.3.1 Variabel *Good Governance*

Tanggapan responden pada masing-masing pertanyaan yang terdapat pada variabel *Good Governance* adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Tanggapan Responden Pada Variabel *Good Governance*

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah Responden	Rata-Rata	Ket.
		1	2	3	4	5			
1.	Anggaran	6	12	19	29	34	100	4,13	Tinggi
2.	Pemantauan	5	14	17	27	37	100	3,77	Tinggi
3.	Perencanaan	4	13	24	28	31	100	3,69	Tinggi
4.	Penggunaan Dana	6	7	16	12	59	100	4,11	
5.	Kepentingan Masyarakat	12	12	18	12	46	100	3,68	Tinggi
6.	Manfaat	3	7	14	27	49	100	4,12	Tinggi
7.	Penyaluran	4	12	16	21	47	100	3,95	Tinggi
Jumlah								27,45	
Rata-Rata								3,92	Tinggi

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.5, hasil analisis menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel *Good Governance* termasuk dalam kategori tinggi, dengan nilai rata-rata 3,92. Nilai ini mencerminkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik telah mulai diterapkan oleh pemerintah desa, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai merasakan adanya keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan desa, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan pada beberapa aspek.

Pernyataan “Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran desa dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat” memperoleh nilai tanggapan tertinggi dari responden, yaitu 4,13, yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pemerintah desa telah cukup terbuka dalam menyampaikan informasi keuangan desa, seperti realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan perencanaan program. Keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

Sebaliknya, pernyataan “Dana desa digunakan sesuai kepentingan masyarakat” memperoleh nilai tanggapan terendah, yaitu 3,68, yang termasuk dalam kategori Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum menilai penggunaan dana desa sudah cukup sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun demikian, dibandingkan dengan pernyataan lainnya, skor ini merupakan yang paling rendah, yang dapat mengindikasikan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kesesuaian antara alokasi dana desa dengan aspirasi masyarakat

secara lebih menyeluruh dan partisipatif. Upaya memperkuat keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan evaluasi program desa menjadi langkah penting agar persepsi positif ini terus meningkat.

4.3.2 Variabel Partisipasi Masyarakat

Tanggapan responden pada masing-masing pertanyaan yang terdapat pada variabel Partisipasi Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Tanggapan Responden Pada Variabel Partisipasi Masyarakat

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah Responden	Rata-Rata	Ket.
		1	2	3	4	5			
1.	Berkontribusi	3	8	23	27	39	100	3,91	Tinggi
2.	Mendukung	10	9	23	27	31	100	3,6	Sedang
3.	Berpartisipasi Aktif Secara Sukarela	4	9	23	35	29	100	3,76	Tinggi
4.	Kelembagaan Desa	7	6	21	29	37	100	3,83	Tinggi
5.	Fungsi Masyarakat	2	9	21	33	35	100	3,88	Tinggi
6.	Motivasi Masyarakat	4	7	20	27	42	100	3,96	Tinggi
Jumlah								19,18	
Rata-Rata								3,19	Sedang

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.6, hasil analisis menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Partisipasi Masyarakat termasuk dalam kategori sedang, dengan nilai rata-rata 3,19. Nilai ini mencerminkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa atau pembangunan berada pada tingkat yang cukup, namun belum optimal. Artinya, masyarakat mulai menunjukkan partisipasi, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan terutama dalam aspek kontribusi nyata dan berkelanjutan.

Pernyataan “Masyarakat memiliki motivasi tinggi untuk berperan aktif dalam pembangunan desa” memperoleh nilai tanggapan tertinggi dari responden, yaitu 3,96, yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keinginan dan semangat yang besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, baik dalam bentuk ide, waktu, maupun tenaga.

Sebaliknya, pernyataan “Masyarakat mendukung pembangunan desa melalui sumbangan dana atau fasilitas pribadi” memperoleh nilai tanggapan terendah dari responden, yaitu 3,60, yang termasuk dalam kategori sedang. Ini mengindikasikan bahwa meskipun partisipasi secara non-material cukup kuat, kontribusi dalam bentuk materi atau fasilitas pribadi masih terbatas. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya kesadaran tentang pentingnya kontribusi tersebut, atau pandangan bahwa pendanaan adalah tanggung jawab utama pemerintah desa.

4.3.3 Variabel Kinerja Pemerintah Desa

Tanggapan responden pada masing-masing pertanyaan yang terdapat pada variabel Kinerja Pemerintah Desa sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Tanggapan Responden Pada Variabel Kinerja Pemerintah Desa

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah Responden	Rata-Rata	Ket.
		1	2	3	4	5			
1.	Pelayanan	4	7	18	27	44	100	4,00	Tinggi
2.	Solusi	4	15	21	21	39	100	3,76	Tinggi
3.	Melayani	3	8	30	30	29	100	3,74	Tinggi
4.	Menampung Aspirasi	4	5	31	32	28	100	3,75	Tinggi
5.	Sumber Daya Manusia	5	6	27	28	34	100	3,8	Tinggi
Jumlah								53,25	
Rata-Rata								10,65	Tinggi

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Hasil analisis ditunjukkan pada Tabel 4.7, yang menunjukkan bahwa rata-rata respons responden terhadap variabel Kinerja Pemerintah Desa adalah 10,65, yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai kinerja pemerintah desa sudah berjalan cukup optimal, khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pernyataan “Aparatur desa memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada masyarakat dan lembaga desa” memperoleh skor respons tertinggi, yaitu 4,00, yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap sikap profesional aparatur desa dalam menjalankan tugas, baik kepada individu maupun kepada lembaga di tingkat desa. Pelayanan yang sesuai prosedur, ramah, dan bertanggung jawab menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Sementara itu, pernyataan “Aparatur desa telah melayani masyarakat sesuai tugasnya dengan cepat” memperoleh skor terendah, yaitu 3,74, meskipun masih berada dalam kategori tinggi. Skor ini mengindikasikan bahwa aspek kecepatan pelayanan masih menjadi perhatian masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, atau belum optimalnya sistem pelayanan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam hal efisiensi waktu dan kecepatan tanggapan aparatur desa terhadap kebutuhan warga.

4.4 Analisis Data

4.4.1 Penilaian Outer Model (*Model Measurement*)

Tiga kriteria validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas komposit disertakan dalam metode analisis data yang memanfaatkan SmartPLS untuk mengevaluasi model luar.

4.4.1.1 *Convergent Validity*

Menentukan validitas hubungan dan mengukur kekuatan korelasi antara indikator dan variabel latennya merupakan tujuan validitas konvergen. Evaluasi uji validitas konvergen dapat didasarkan pada Average Variance Extracted (AVE) dan faktor pemuatan atau outer loading. Batas faktor pemuatan yang sering digunakan dalam penelitian adalah 0,70. Ketika nilai outer loading lebih dari 0,70, suatu indikator dianggap memiliki tingkat validitas yang tinggi dan memenuhi validitas konvergen. Menurut Hair et al. (2015) dalam (Alvin et al., 2023), nilai Average Variance Extracted (AVE) lebih dari 0,50.

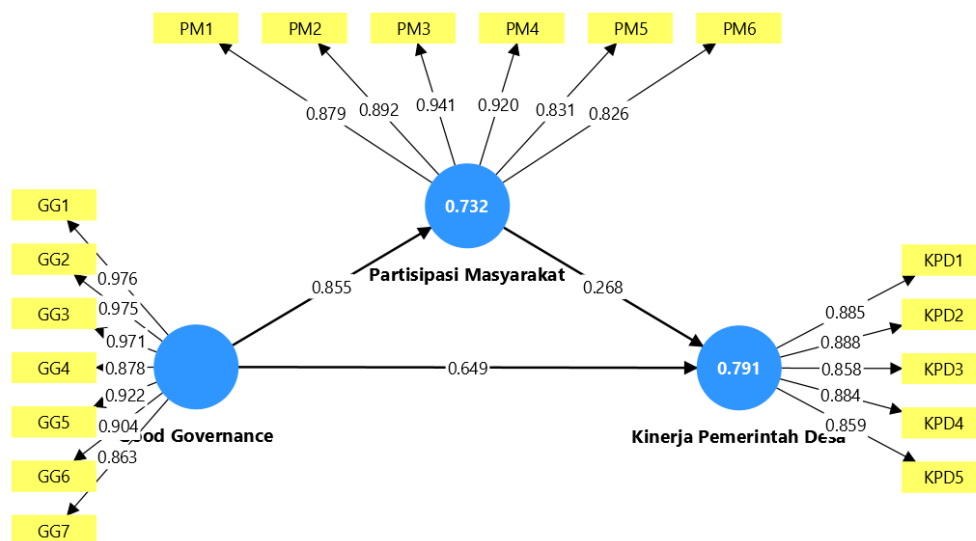
Tabel 4. 8 Outer Loadings (*Measurement Model*)

Variabel	Indikator	Loading Factor	AVE
Good Governance	GG1	0.976	0.861
	GG2	0.975	
	GG3	0.971	
	GG4	0.878	
	GG5	0.922	
	GG6	0.904	
	GG7	0.863	
Kinerja Pemerintah Desa	KPD1	0.885	0.766
	KPD2	0.888	
	KPD3	0.858	
	KPD4	0.884	
	KPD5	0.859	
Partisipasi Masyarakat	PM1	0.879	0.779

	PM2	0.892
	PM3	0.941
	PM4	0.920
	PM5	0.831
	PM6	0.826

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Skema dapat dilihat dari gambar 4.1 berikut:



Gambar 4. 1 Uji Validitas Outer Loading

Nilai faktor pemuatan pada setiap indikasi setiap variabel memiliki nilai faktor pemuatan $> 0,7$, menurut temuan pengolahan menggunakan SmartPLS pada Tabel 4.8. Hal ini menunjukkan bahwa validitas konvergen telah terpenuhi oleh nilai outer model atau korelasi antara konsep dan variabel. Dengan demikian, dapat dikatakan sah dan menunjukkan keterkaitan yang erat antara konsep dengan indikasi pada setiap variabel. Lebih lanjut, nilai Average Variance Extracted (AVE) setiap variabel menunjukkan seberapa baik indikator menjelaskan variasi konstruk yang berbeda. Angka AVE lebih dari 0,5 saat menilai derajat variasi indikator. Menurut penjelasan Tabel 4.8, setiap variabel indikator memiliki nilai AVE lebih

besar dari 0,5. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa indikator penelitian berkorelasi kuat dan relevan dengan konsep. Dengan demikian, nilai kuesioner dikatakan memenuhi validitas konvergen.

4.4.1.2 Discriminant Validity

Jika setiap indikator variabel laten mempunyai nilai muatan tertinggi relatif terhadap nilai muatan variabel laten yang lain, maka validitas diskriminan model tersebut dikatakan sangat baik.

Tabel 4. 9 Cross Loading

Variabel	Indikator	<i>Good Governance</i>	Kinerja Pemerintah Desa	Partisipasi Masyarakat
Good Governance	GG1	0.976	0.857	0.814
	GG2	0.975	0.856	0.820
	GG3	0.971	0.870	0.815
	GG4	0.878	0.779	0.818
	GG5	0.922	0.774	0.766
	GG6	0.904	0.805	0.775
	GG7	0.863	0.760	0.745
Kinerja Pemerintah Desa	KPD1	0.824	0.885	0.770
	KPD2	0.809	0.888	0.755
	KPD3	0.716	0.858	0.681
	KPD4	0.737	0.884	0.687
	KPD5	0.748	0.8599	0.701
Partisipasi Masyarakat	PM1	0.768	0.717	0.879
	PM2	0.677	0.713	0.892
	PM3	0.787	0.780	0.941
	PM4	0.859	0.791	0.920
	PM5	0.666	0.673	0.831
	PM6	0.753	0.675	0.862

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Nilai faktor pemuatan setiap indikator variabel laten lebih tinggi daripada nilai pemuatan variabel laten lainnya, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.9. Variabel laten memiliki validitas diskriminan yang kuat, hal ini dapat disimpulkan.

4.4.1.3 Composite Reliability

4.4.2 Uji Reliabilitas

Tujuan uji reliabilitas adalah untuk menilai tingkat konsistensi internal model SEM PLS. Reliabilitas menunjukkan seberapa akurat dan konsisten alat ukur tersebut menjalankan tujuan yang dimaksudkan. Alpha Cronbach dan Composite Reliability (CR) adalah dua teknik yang digunakan dalam uji reliabilitas. Alpha Cronbach digunakan untuk mengukur ketergantungan suatu konstruk. Di sisi lain, Composite Reliability berupaya menentukan konsistensi internal suatu konstruk. Meskipun nilai 0,60 masih dapat diterima, instrumen kuesioner dianggap dapat dipercaya jika nilai reliabilitas komposit dan alpha Cronbach lebih tinggi dari 0,70 (Hair et al., 2019).

Tabel 4. 10 Composite Reliability, Cronbach's Alpha dan AVE

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	Average Variance Extracted (AVE)
Good Governance	0.973	0.974	0.977
Kinerja Pemerintah Desa	0.923	0.926	0.942
Partisipasi Masyarakat	0.943	0.947	0.955

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa kesesuaian statistik, skala, dan ukuran semuanya memuaskan. Variabel partisipasi masyarakat, kinerja pemerintahan desa, dan tata kelola pemerintahan yang baik memiliki nilai Cronbach's Alpha masing-masing sebesar 0,943, 0,923, dan 0,973. Nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel tersebut lebih dari 0,70. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa indikator ketiga variabel tersebut di atas dapat diandalkan atau memiliki

ketergantungan yang sangat baik. Nilai variabel Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Kinerja Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat dalam Keandalan Komposit masing-masing adalah 0,974, 0,926, dan 0,947. Berdasarkan data keandalan komposit, setiap variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa indikasi ketiga variabel tersebut dapat dipercaya.

Berdasarkan hasil analisis, indikator untuk setiap variabel memiliki nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha lebih dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel mengukur setiap variabel tersembunyi secara konsisten. Akibatnya, semua variabel yang telah dinilai dapat dikatakan dapat dipercaya, dan temuan penelitian dapat diandalkan karena konsistensinya.

4.4.3 Analisis Model Struktur (*Inner Model*)

Proporsi variasi yang dijelaskan digunakan untuk menilai model internal, yang juga dikenal sebagai model struktural. Model internal, yang melihat sejauh mana variabel laten memengaruhi komputasi asli, adalah model struktural yang didasarkan pada nilai koefisien jalur. Uji kesesuaian model, atau R-square, dapat digunakan untuk menilai model internal.

4.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Dengan kata lain, uji koefisien determinasi (R-Square) dapat digunakan untuk menguji korelasi atau hubungan antara variabel independen dan dependen. R-Square juga sering disebut sebagai koefisien determinasi, yang menggambarkan sejauh mana data dependen dapat dijelaskan oleh data independen. Nilai R-square berkisar dari 0 hingga 1, dengan gagasan bahwa semakin dekat nilainya dengan 1, semakin baik. Nilai interpretasi R-square terbagi menjadi tiga kelompok, menurut

Ketchen (2013): 0,25 (dampak lemah), 0,50 (pengaruh sedang), dan 0,75 (pengaruh kuat).

Tabel 4. 11 Nilai *R-Square*

Item	R-Square	R-Square adjusted	Keterangan
Kinerja Pemerintah Desa	0.791	0.787	Tinggi
Partisipasi Masyarakat	0.732	0.729	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan hal berikut :

1. Nilai *R-Square* Variabel Kinerja Pemerintah Desa memiliki nilai R-Square sebesar 0,791 (tinggi), artinya komponen-komponen dalam model penelitian ini dapat mempengaruhi 79,1% minat beli. Ini berarti model tersebut kuat. Variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian memiliki pengaruh terhadap sisanya sebesar 20,9%.
2. Nilai R-Square variabel Partisipasi Masyarakat sebesar 0,732 (tinggi), artinya 73,2% Partisipasi Masyarakat dapat dipengaruhi oleh elemen-elemen dalam model penelitian ini, atau model tersebut kuat. Namun, variabel-variabel di luar model penelitian memiliki pengaruh terhadap sisanya sebesar 26,8%.

4.4.3.2 Predictive Relevance (*Q-Square*)

Signifikansi prediktif Q^2 dapat digunakan untuk menilai hasil model struktural selain memeriksa ukuran nilai R-Square. Penelitian menunjukkan bahwa jika Q-Square digunakan untuk memberikan informasi penting tentang kemampuan prediktif model, nilai yang lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa model tersebut memiliki nilai observasi yang baik, sedangkan nilai yang kurang

dari 0 menunjukkan bahwa model tersebut memiliki nilai observasi yang buruk (Chin & Newsted, 1998). Perhitungan berikut menghasilkan nilai Q-Square.:

$$\begin{aligned} Q^2 &= 1 - (1 - R^2_{PI}) \times (1 - R^2_{PB}) \\ &= 1 - (1 - 0,209) \times (1 - 0,268) \\ &= 1 - 0,579612 \\ &= 0,420388 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan di atas adalah 0,420388 untuk Q-Square. Karena nilai Q² lebih besar dari nol, hasil ini menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat relevansi prediktif yang baik dan akurat.

4.4.4 Uji Hipotesis

Untuk menunjukkan hubungan atau perbedaan antara faktor endogen dan eksogen, pengujian hipotesis dapat digunakan. Bootstrap PLS-SEM 4 digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi hipotesis. Hipotesis adalah klaim yang memerlukan bukti karena tidak selalu benar dan masih lemah atau sementara. Untuk menunjukkan apakah hipotesis dalam penelitian diterima atau ditolak, pengujian hipotesis dilakukan. Dengan demikian, pengujian hipotesis merupakan tahap penting dalam proyek penelitian. Nilai koefisien jalur dari statistik-t dari hubungan antara variabel penelitian dapat digunakan untuk menentukan perhitungan dalam pengujian hipotesis. Dengan menggunakan nilai tabel-t yang diberikan, prosedur bootstrap menghasilkan nilai statistik-t. Hipotesis akan diterima jika nilai statistik-t lebih tinggi dari nilai tabel-t. Dengan ambang signifikansi 5%, atau 0,05, dan nilai statistik-t 1,96, penelitian ini menunjukkan peluang 5% untuk menolak hipotesis yang sebenarnya benar. Sementara itu, ada

peluang 95% bahwa hipotesis yang diuji itu benar. Nilai statistik-t yang digunakan dalam pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik adalah 1,96, dan nilai alfa adalah 5%. Jika nilai-p kurang dari 0,05 dan nilai statistik-t lebih dari 1,96, hubungan antara variabel akan dianggap signifikan. Analisis jalur dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Dimungkinkan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel secara langsung atau tidak langsung.

A. Uji Signifikan Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Hipotesis bahwa variabel eksogen memiliki pengaruh langsung terhadap variabel endogen diuji menggunakan metode Direct Effect (pengaruh langsung). Berikut ini adalah contoh uji hipotesis uji pengaruh langsung :

Tabel 4. 12 Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Hipotesis		<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics</i>	<i>P values</i>	Ket
H1	Good Governance -> Kinerja Pemerintah Desa	0.649	0.645	0.089	7.260	0.000	H1 diterima
H2	Good Governance -> Partisipasi Masyarakat	0.855	0.854	0.031	27.315	0.000	H2 diterima
H3	Partisipasi Masyarakat -> Kinerja Pemerintah Desa	0.268	0.272	0.094	2.845	0.004	H3 diterima

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga hipotesis yang diterima. Hasil pengujian dari masing-masing hipotesis sebagai berikut :

- 1) **H1 diterima:** Hipotesis pertama menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa dan *Good Governance* berkorelasi positif. Nilai sampel asli (O) yang bernilai positif 0,649 menunjukkan arah hubungan tersebut. Hal tersebut terlihat dari nilai t-statistik sebesar 7.260 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai P sebesar 0,000 yang berada dalam rentang yang dapat diterima yaitu kurang dari 0,05. Angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa secara signifikan ditingkatkan oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut menunjukkan validitas teori tersebut.
- 2) **H2 diterima:** Hipotesis kedua menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dan *Good Governance* berkorelasi positif. Nilai sampel asli (O) yang bernilai positif 0,855 menunjukkan arah hubungan tersebut. Nilai t-statistik sebesar 27.315 menunjukkan signifikansi, karena nilainya lebih besar dari 1,96 dan nilai P sebesar 0,000 yang berada dalam rentang yang dapat diterima yaitu kurang dari 0,05. Berdasarkan idealisme tersebut, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat secara signifikan ditingkatkan oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa teori tersebut diterima.

3) **H3 diterima:** Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat berkorelasi positif. Nilai sampel asli (O) yang bernilai positif 0,268 menunjukkan arah hubungan tersebut. Namun, nilai t-statistik sebesar 2,845 yang nilainya $> 1,96$ menunjukkan signifikansi dan nilai P sebesar 0,043 berada dalam rentang yang dapat diterima, yaitu $< 0,05$. Berdasarkan kriteria tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintahan desa secara signifikan ditingkatkan oleh partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa teori tersebut diterima.

B. Uji Signifikan Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Indirect Effect dilakukan untuk menguji adanya pengaruh tidak langsung antara variabel eksogen dan endogen. Hasil pengujian sebagai berikut :

Tabel 4. 13 Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Hipotesis		Original Sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics	P values	Ket
H1	Good Governance -> Partisipasi Masyarakat -> Kinerja Pemerintah Desa	0.230	0.233	0.083	2.781	0.005	Hipotesis diterima

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.13 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hipotesis diterima: Kinerja pemerintahan desa menunjukkan korelasi yang baik antara partisipasi masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai sampel asli (O) yang bernilai positif 0,230 menunjukkan arah hubungan tersebut. Namun, nilai t-statistik sebesar 2,781 yang nilainya $> 1,96$ menunjukkan signifikansi, dan nilai P sebesar 0,005 berada dalam rentang yang dapat diterima, yaitu $< 0,05$. Berdasarkan kinerja pemerintahan desa, dapat disimpulkan bahwa tata kelola

pemerintahan yang baik secara signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa teori tersebut diterima.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Good Governance terhadap Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan temuan penelitian, terlihat jelas bahwa keterlibatan masyarakat secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh tata kelola yang efektif. Konsep tata kelola yang baik mencakup metrik seperti daya tanggap, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan. Untuk membangun pemerintahan desa yang transparan dan inklusif, ide-ide ini sangat penting.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat mengacu pada keterlibatan aktif penduduk setempat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan desa. Keterlibatan ini dapat berupa menghadiri rapat desa, berkontribusi pada diskusi kebijakan, dan mengawasi inisiatif lokal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa meningkat seiring dengan sejauh mana konsep tata kelola yang baik digunakan dalam tata kelola desa. Misalnya, masyarakat memperoleh kepercayaan diri dan terinspirasi untuk mengambil bagian dalam inisiatif pembangunan ketika pemerintah desa secara aktif melibatkan anggota dalam diskusi desa dan mengelola anggaran secara terbuka.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Irmawati (2022) yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lebih meningkat ketika akuntabilitas dan keterbukaan dimasukkan dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut penelitian lain oleh Putra dan

Rasmini (2019), keberhasilan program dan kepercayaan terhadap pemerintah desa dipengaruhi secara positif oleh keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Dengan kata lain, good governance menjadi pondasi utama untuk membangun kepercayaan publik, yang kemudian mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pembangunan. Ketika masyarakat merasa didengarkan, dilibatkan, dan memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, maka partisipasi pun akan tumbuh secara alami. Penerapan good governance tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga menciptakan pemerintahan desa yang lebih akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Hal ini menjadi penting khususnya dalam konteks komunitas Gen Z muslim di Kabupaten Demak, yang cenderung kritis, melek informasi, serta memiliki harapan tinggi terhadap transparansi dan etika dalam pemerintahan desa.

4.5.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh keterlibatan masyarakat. Keterlibatan aktif warga setempat dalam semua tahap pembangunan desa mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga penilaian dikenal sebagai partisipasi masyarakat. Keterlibatan ini merupakan tanda penting pemerintahan desa yang responsif, transparan, dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin baik pula kinerja pemerintah desa. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan warga, mendorong pengawasan terhadap penggunaan anggaran, serta memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa.

Partisipasi masyarakat tidak hanya mencerminkan keterlibatan fisik seperti hadir dalam musyawarah desa, namun juga mencakup partisipasi ide dan pengawasan yang dilakukan secara aktif. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan, mereka akan memiliki rasa memiliki terhadap program-program desa, sehingga akan turut menjaga dan mengawal pelaksanaannya agar berjalan efektif dan efisien.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Putra dan Rasmini (2019) yang menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat. Lebih lanjut, Irmawati (2022) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang keduanya berdampak langsung pada peningkatan kinerja aparatur daerah.

Kinerja pemerintah desa yang baik dapat terlihat dari indikator seperti pelayanan yang cepat dan tepat, pelaksanaan program pembangunan yang sesuai sasaran, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Semua ini tidak dapat dicapai tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa, terutama dalam konteks generasi muda seperti Gen Z di Kabupaten Demak, yang memiliki keinginan besar untuk terlibat dalam perubahan sosial dan lebih kritis terhadap kinerja pemerintah. Pelibatan mereka secara aktif dapat menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih transparan, inklusif, dan berdaya saing.

4.5.3 Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Desa melalui Partisipasi Masyarakat

Sebagaimana ditunjukkan oleh temuan penelitian, keterlibatan masyarakat bertindak sebagai variabel intervening yang melaluinya tata kelola yang baik secara tidak langsung memengaruhi kinerja pemerintah desa. Dengan kata lain, semakin efektif pemerintah desa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, maka akan semakin mendorong keterlibatan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pemerintah. Indikator tata kelola yang baik dalam konteks pemerintahan desa meliputi daya tanggap, akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan. Masyarakat akan merasa lebih dihargai, dilibatkan, dan diberi ruang untuk mengekspresikan tujuan dan melakukan pengawasan ketika prinsip-prinsip ini secara rutin ditegakkan. Keadaan ini akan mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan menumbuhkan rasa percaya.

Sementara itu, partisipasi masyarakat menjadi jembatan penting antara penerapan good governance dan pencapaian kinerja pemerintah desa. Ketika masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, maka program-program desa yang dijalankan akan lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pemerintah desa.

Hasil penelitian ini mendukung temuan dari Mada et al. (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat memediasi hubungan antara penerapan good governance dengan akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa. Demikian pula, Novita Sari (2023) menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan publik dalam

mengelola dana desa sebagai strategi utama dalam meningkatkan hasil dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa.

Dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, program pembangunan desa menjadi lebih inklusif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi anggaran, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Secara khusus dalam konteks komunitas Gen Z muslim di Kabupaten Demak, partisipasi masyarakat tidak hanya mencakup kehadiran fisik, namun juga partisipasi digital dan advokasi kebijakan. Gen Z yang melek teknologi dan kritis terhadap isu-isu sosial sangat potensial menjadi aktor penggerak dalam membentuk pemerintahan desa yang berintegritas dan responsif terhadap aspirasi publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa good governance tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Peran partisipatif masyarakat menjadi penghubung yang krusial antara kebijakan yang baik dan hasil pelayanan publik yang optimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari sudut pandang masyarakat muslim Gen Z di Kabupaten Demak berdasarkan hasil penelitian tentang dampak *good governance* terhadap kinerja pemerintahan desa dengan menggunakan partisipasi masyarakat sebagai variabel *intervening*..

1. Keterlibatan masyarakat berdampak positif pada pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai proses pembangunan dan pengambilan keputusan publik jika konsep tata kelola yang baik, yaitu akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, dan daya tanggap, diterapkan dengan tepat. Tata kelola yang baik meningkatkan keinginan masyarakat untuk terlibat dengan menumbuhkan suasana transparansi dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih luas dan lebih lama, diperlukan tata kelola yang baik.
2. Kinerja pemerintahan desa berdampak positif pada keterlibatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa lebih baik dalam memenuhi tanggung jawabnya jika masyarakat lebih terlibat dalam proses pembangunan desa. Kebijakan pemerintahan desa akan lebih terarah dan peka terhadap kebutuhan masyarakat jika masyarakat secara aktif mengungkapkan tujuannya, terlibat dalam diskusi, dan mengawasi

pelaksanaan inisiatif. Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang lebih besar juga didorong dalam operasi pemerintahan desa. Akibatnya, keterlibatan masyarakat merupakan komponen penting yang secara langsung meningkatkan standar pemerintahan desa

3. Efektivitas pemerintahan desa dipengaruhi secara positif oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang dimediasi oleh keterlibatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terdapat tingkat keterlibatan masyarakat yang signifikan, dampak tata kelola pemerintahan yang baik terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa akan semakin kuat. Dengan kata lain, jika masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan dan pemantauan kebijakan, kinerja pemerintahan desa akan lebih signifikan dipengaruhi oleh penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik seperti keterbukaan, akuntabilitas, dan daya tanggap. Keterkaitan antara tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan efektivitas dan efisiensi operasi pemerintahan desa diperkuat oleh keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjamin bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik benar-benar menghasilkan kinerja pemerintahan yang sebaik mungkin.

5.2 Saran

Rekomendasi berikut dapat dibuat berdasarkan temuan penelitian tentang dampak keterlibatan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap peningkatan kinerja pemerintah desa, serta sudut pandang populasi Muslim Gen Z di Kabupaten Demak.:

1. Peningkatan Praktik Prinsip *Good Governance*

Mendorong Partisipasi Aktif Komunitas Gen Z dalam Proses Pembangunan Desa Pemerintah desa diharapkan lebih inklusif dalam melibatkan Gen Z Muslim dalam berbagai musyawarah desa, forum aspirasi, serta kegiatan sosial dan pembangunan. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat demokrasi lokal, tetapi juga membentuk rasa kepemilikan (*sense of belonging*) masyarakat terhadap kemajuan desa mereka.

2. Fasilitasi dan Penguatan Keterlibatan Masyarakat

Meningkatkan keterlibatan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan desa, maka diperlukan upaya konkret untuk memfasilitasi dan mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah desa dapat mengadakan forum rutin, musyawarah desa, serta memanfaatkan teknologi digital (seperti media sosial dan platform layanan publik) guna memperluas jangkauan dan efektivitas komunikasi dengan masyarakat.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Agar kinerja pemerintahan desa optimal dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola partisipasi masyarakat dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pelatihan, pendampingan teknis, dan pembinaan

berkala dapat menjadi strategi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur desa.

4. Penguatan Peran Masyarakat sebagai Mitra Pemerintahan

Pemerintah desa perlu mendorong masyarakat agar tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program desa. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok masyarakat, peningkatan literasi tata kelola, dan pemberdayaan komunitas lokal.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, di antaranya:

1. Fokus penelitian masih terbatas pada persepsi komunitas Gen Z Muslim di Kabupaten Demak, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi ke kelompok usia lain atau daerah yang berbeda.
2. Beberapa indikator dalam variabel partisipasi masyarakat memiliki skor yang belum optimal, yang menunjukkan masih adanya kendala dalam keterlibatan aktif masyarakat pada tataran praktis.
3. Penilaian terhadap kinerja pemerintah desa bersifat subjektif berdasarkan persepsi responden, sehingga belum menggambarkan sepenuhnya data kinerja yang bersifat kuantitatif atau administratif.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Adapun beberapa saran untuk agenda penelitian mendatang adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan validitas eksternal dan generalisasi temuan, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan di kabupaten lain di Jawa Tengah atau di tempat-tempat dengan ciri masyarakat yang berbeda.
2. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana keterlibatan masyarakat dan tata kelola yang baik mempengaruhi kinerja pemerintah desa, peneliti masa depan didorong untuk menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif.
3. Agenda mendatang juga dapat menambahkan variabel mediasi atau moderasi lainnya seperti literasi digital, kepemimpinan kepala desa, atau tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, untuk melihat lebih dalam faktor-faktor yang memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel (Zakaria, 2023 & Shodikin et al., 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Bergman, M., & Lane, J. E. (1990). *Public Policy In A Principal-Agent Framework*. *Journal Of Theoretical Politics*, 2(3), 339–352. <https://doi.org/10.1177/0951692890002003005>
- Ghozali, I. (2016). *Ekonometrika Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan SPSS 17*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nurbaeti, T., & Nugraha, D. S. (T.T.). Pengaruh *Good Governance* Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Garut). www.jabarprov.go.id,
- Silaen, S. (2018). *Metode Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Penerbit In Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian, Kualitatif, Dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. CV Alfabeta.
- Zehan, A., Sari, P., Natalia, N. G., Wulan, R., & Cahya, N. (2023). *Good Governance* Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Indonesia. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 185–192. <https://doi.org/10.56910/jispendingora.v2i2.660>
- S.S Maranda, N.M.D, Ratnadi,N.K Rasminii.D.D.D, Saputra. Tata Kelola, Kompetensi Dan Pencegahan Kecurangan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, *Res.J Rekening Keuangan*. 13 (1) (2022) 54-65
- Md. Abdul Hakim, Tata Pemerintah Yang Baik Disuatu Desa Dan Perlunya Otonomi Desa Di Bangladesh, *Bangladesh J.Admin Publik XXI* (1) (2021)
- D. Mutiarin, M.Iqbal, *Smart Village Governance: Partisipasi Masyarakat Pada Badan Usaha Milik Desa Panggunharjo*, *Publ. (J.Ilm Admin)* 10 (2) (2022)
- YM Basri TI Findayani, A.Zarefar, Penerapan *Good Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa, *J.Akunt* (2021)
- F. Jalalialiabadi, B.Masyayekhi, G.Gal, Persepsi Dan Persepsi Penyusun Anggaran Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja: Kasus Universitas Negeri Dan Lembaga Penelitian Iran, *J.Publik Budget, Account, Keuangan*

- Y. Budiati, E.K Sugiyanto A Niati, Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal, EKUITAS (J Ekon. Dan Keuangan) (2020)
- E. Handayani, S Pratolo, T. Pandansari, MP Aji, Persepsi Dukungan Organisasi Untuk Implementasi Anggaran Berdasarkan Kinerja Universitas Swasta Di Indonesia, Qual Akses Sukses (2023)
- Kabar Desa (2021), Ini Rincian Dana Desa Tahun 2021
- Saragih, R (2019). Kegagalan Dana Desa Karena Ketidaksiapan Aparat
- Soleh Harno & Khikmatul Islah (2023) – “*Analysis of The Quality of Public Services in the Implementing Unit of Population and Civil Registration in Cipayung Sub-District, East Jakarta*
- Detik.com. (2023, Februari 20). *Pengertian Skala Likert, metode, dan contohnya untuk penelitian.* <https://www.detik.com/bali/berita/d-6607480/pengertian-skala-likert-metode-dan-contohnya-untuk-penelitian>
- Rudiana, R. (2023). *Good Governance* Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah STIE Pari, 2(2), 186–188. Diakses Dari <https://Jurnal-Stiepari.Ac.Id/Index.Php/Jispendiora/Article/Download/660/661>
- Kurnia, R. S. (2023). Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Di Kabupaten Bandung [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. Diakses Dari https://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/32516/2/2_Abstrak.Pdf
- Liputan6.Com. (2025, 28 Februari). Tujuan *Good Governance* Dan Implementasinya Di Indonesia. Diakses Dari <https://Www.Liputan6.Com/Feeds/Read/5903825/Tujuan-Good-Governance-Dan-Implementasinya-Di-Indonesia>
- IAP2 Indonesia. (2021, 17 Desember). Pentingnya Partisipasi Publik Untuk Mewujudkan *Good Governance*. Diakses Dari <https://Iap2.Or.Id/Pentingnya-Partisipasi-Publik-Untuk-Mewujudkan-Good-Governance/>
- Rachmawati, A., Arifin, B., & Siregar, D. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah*

- Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 45–55. Diakses Dari <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/download/1604/1193>
- Irmawati. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 13(1), 10–20. Diakses Dari <https://www.jurnal-umsi.ac.id/index.php/administrasita/article/download/341/295/490>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Akuntansi*. Diakses Dari <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/download/1635/1563/8256>
- Daeli, W., Tauhid, K., Maharani, C., Moeliono, M., & Bong, I. W. (2017). *Dari partisipasi ke inklusi: Pembelajaran dari desain dan pelaksanaan proyek pembangunan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat* (Infobrief No. 164). Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/006336>
- Sari, N. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Repository Universitas Medan Area*. Diakses Dari <https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18560/2/188330055%20-%20Novita%20Sari%20-%20Fulltext.Pdf>
- Mada, Dkk. (2017). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Dan Kinerja Pemerintah Desa. *Jurnal Ekuitas*. Diakses Dari <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/download/3842/2170/>
- Utami, & Syofyan. (2013). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran Desa. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*. Diakses Dari <http://eprints.perbanas.ac.id/8282/1/ARTIKEL%20ILMIAH.Pdf>
- Zakaria, A. R. (2023). Pengaruh literasi digital terhadap hasil belajar dengan kecerdasan emosional sebagai variabel mediasi mahasiswa. *Edunomia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 4(1), 88–95. <https://doi.org/10.15294/edunomia.v4i1.4878>

Shodikin, M., Sari, I. P., Sari, P. S., Laili, N., & Darotin. (2024). Pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa dan kompetensi perangkat desa terhadap kinerja perangkat desa dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(2), 190–206. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i2.4691>

